

JURNAL

IMPLEMENTASI PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERKAIT DENGAN MODULASI FREKUENSI RADIO YANG TIDAK MEMILIKI IZIN SPEKTRUM FREKUENSI (STUDI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN MADIUN)

ARTIKEL ILMIAH

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DENIS PRAVITA SARI

NIM. 105010103111036



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL

Implementasi Pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Terkait Dengan Modulasi Frekuensi Radio Yang Tidak Memiliki Izin Spektrum
Frekuensi (Studi di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Madiun)

Oleh

DENIS PRAVITA SARI

NIM 105010103111036

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.istislam, SH,Mhum.
NIP:.. 19620823 198601 1002

Agus Yulianto, SH, Mhum
NIP. 19590717 198601 1001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfy Effendi, SH, Mhum
NIP. 19600 810 198601 1 002

Implementasi Pasal 33 Undang-undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terkait Dengan Modulasi Frekuensi Radio Yang Tidak Memiliki Izin Spektrum Frekuensi

ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema permasalahan perizinan frekuensi radio di Kabupaten Madiun dengan menngungkapnya dari sisi implementasi Undang-undang penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Dalam kasus ini mencoba untuk melihat banyaknya radio yang mengudara tetapi tidak memiliki izin frekuensi. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis artinya disamping melihat langsung ketentuan Undang-Undang yang mengatur masalah perizinan frekuensi radio, juga melihat langsung yang terjadi dilapangan (masyarakat) atau *field reseach*. Data-data yang didapat kemudian direduksi dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diintreprestasikan dengan memberikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implementasi UU Nomor 32 tahun 2002 dilakukan dengan metode pengawasan terhadap frekuensi siaran setiap radio, sera didapatkan bahwa keengganan bagi radio swasta untuk mendapatkan izin adalah terletak pada alasan birokratis dan administratif.

Kata Kunci: Radio, Penyiaran

**The Implementation of Article 33 of Act No.32 of 2002 about Broadcasting
To Regulate Radio Frequency Modulation that Does Not Have
Frequency Spectrum Permit**

ABSTRACT

The author attempts to elaborate in this final paper a theme of radio frequency permit in Madiun District by explaining the theme under a perspective of the implementation of Act No. 32 of 2002 about Broadcasting. The highlighted case is that many radios are broadcasting without frequency permit. In this final paper, the author uses empirical juridical approach, precisely sociological juridical approach which means that the author not only examines the legislation which regulates radio frequency permit, but also does observation in the society or called *field research*. The collected data are reduced in order to sharpen, to classify, to direct, to remove the unnecessary, and to organize the data. The analysis technique is descriptive analysis. Such analysis is a problem solving procedure by exposing or describing the data from field observation and literature study, and then placing the data to be analyzed and interpreted to produce a conclusion.

Based on the result of research, the author obtains the answer for the problem as follows. Act No. 32 of 2002 can be implemented through the monitoring against broadcast frequency of each radio. Private radios are reluctant to obtain permit due to bureaucratic and administrative reasons.

Keywords: Radio, Broadcasting

PENDAHULUAN

Salah satu Undang-undang yang paling ramai dibicarakan pada era reformasi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (selanjutnya disingkat dengan UU 32/2002) tentang Penyiaran. Pada tahapan masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibahas di DPR pro dan kontra bermunculan. Pembahasan RUU ini termasuk paling ramai dibicarakan masyarakat dan berlangsung alot dan memakan waktu sekitar tiga tahun, hingga dapat disahkan pada bulan Desember 2002.

Undang-Undang Penyiaran mengatur hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh suatu lembaga penyiaran dan mereka yang bekerja pada lembaga penyiaran dan hal apa saja yang dilarang. Undang-Undang memuat sanksi bagi kesalahan yang dilakukan pekerja di bidang Penyiaran, karena itu sepatutnya setiap manusia penyiaran memahami Undang-Undang ini.

Jenis pelanggaran dalam UU Penyiaran terbagi atas dua, yaitu Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Teknis Administratif (Non-Kode Etik). Pelanggaran non-Kode Etik terkait dengan hal-hal yang bersifat teknik administratif, misalnya pelanggaran ketentuan mengenai izin pelanggaran ketentuan mengenai izin penyelenggaraan siaran, ketentuan mengenai jangkauan atau frekuensi siaran, ketentuan muatan local, ketentuan mengenai hak siar, ketentuan mengenai kepemilikan lembaga penyiaran, ketentuan mengenai laporan keuangan dan lain-lain.

Demokratisasi Frekuensi dan Penyiaran di Indonesia, sebagai bentuk hak azasi manusia bagi komunikasi publik semakin banyak diminati dengan berdirinya ribuan radio siaran komersial dan komunitas baru dari kota sampai pelosok pedesaan, tiba – tiba terhentak pucat pasi dengan hadirnya 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah pengganti UU 22 tahun 1999. Desentralisasi pemberian ijin frekuensi oleh pemerintahan provinsi dikembalikan kepada pemerintahan pusat mengacu pada UU Penyiaran No. 32

tahun 2002 dan UU 36 tentang telekomunikasi bahwa perijinan frekuensi dan orbit satelit hanya dapat dikeluarkan oleh menteri. Kekhawatiran sebagian besar peminat media penyiaran, kebebasan pers kembali akan terpasung. UU Penyiaran mewajibkan radio dan TV baik komersial (Swasta), komunitas, publik maupun jasa penyiaran berlangganan harus memiliki izin penyiaran, selain izin alokasi frekuensi. Perizinan penyelenggaraan Penyiaran dan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul Komisi Penyiaran Indonesia. (pasal 33, UU No.32/2002).

Kewenangan penerbitan izin radio siaran tidak lagi berada pada kewenangan Dirjen Postel (Surat Dirjen postel Nomor : 168/IV.2.2/ DITFREK/VI/2003 perihal Perizinan radio siaran masa transisi), kecuali permohonan mutasi alamat pemancar radio siaran sepanjang berada dalam wilayah layanan (*service area*) yang sama, dan perubahan nama dan penanggungjawab perusahaan. Sambil menunggu terbentuk dan berlakunya KPI (D), Peraturan pemerintah (PP) pelaksana UU Penyiaran tersebut, dan Teknis tata cara perizinan (lintas departemental antara Dephub, Depdagri, Meneg Komunikasi dan informasi) untuk keperluan radio siaran, dapat menghubungi kementrian komunikasi dan informasi di Jakarta, Badan komunikasi dan informasi Propinsi, atau Dinas Perhubungan Propinsi.

Undang-undang Telekomunikasi menegaskan bahwa telekomunikasi di artikan sebagai setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. "Pohon" besar telekomunikasi terdiri atas tiga "cabang" yaitu penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus. "Cabang" telekomunikasi khusus terdiri atas beberapa "ranting", yaitu Meteorologi dan Geofisika, Televisi Siaran, Radio Siaran, Navigasi, Penerbangan, Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan, Amatir Radio, Komunikasi Radio

Antar-Penduduk, Penyelenggaraan Telekomunikasi Instansi Pemerintah Tertentu/Swasta. Jadi, cukup jelas bahwa untuk televisi siaran dan radio siaran menjadi kewenangan UU Telekomunikasi. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat dilakukan untuk (a) Keperluan sendiri yang terdiri atas perseorangan, instansi pemerintah, dinas khusus, badan hukum, (b) Keperluan Pertahanan Keamanan Negara, dan (c) Keperluan Penyiaran. Seluruh kewenangan perizinan untuk penyelenggaraan telekomunikasi ini harus melalui pemerintah pusat yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya, menjadi kewenangan Dirjen Postel Departemen Perhubungan.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci tentang implementasi Pasal 33 UU No.32 tahun 2002

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dalam penyelenggaraan pendirian izin frekuensi radio di Kabupaten Madiun?
2. Apa penyebab banyaknya studio di Kabupaten Madiun yang tidak memiliki izin frekuensi radio?
3. Apa hambatan-hambatan yang muncul ketika dalam memberikan perizinan untuk studio dari pihak pemerintah, pemohon izin dan masyarakat di sekitar studio?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UU Nomor 32 Tahun 2002 merupakan peraturan yang mengatur tentang penyiaran, dimana dalam undang-undang ini juga diatur tentang penyelenggaraan perizinan frekuensi bagi radio-radio swasta. Undang-undang ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Penerapan undang-undang ini dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Bentuk pengawasan untuk penyelenggaraan Radio Siaran Swasta sedikitnya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia¹, Dewan Pers dan pengawasan lain yang dilakukan oleh organisasi terkait. Untuk kaitannya dengan masalah penyiaran, bentuk pengawasan yang diuraikan adalah yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Keberadaan KPI diatur dalam UU Penyiaran. KPI sebagai lembaga independen secara tegas diatur pada pasal 1 butir 13 UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang berada di pusat dan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UU Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Lebih lanjut, dasar hukum pembentukan KPI dimuat dalam pasal 7 UU Penyiaran.

Fungsi KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Untuk menjalankan fungsinya, KPI memiliki kewenangan berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran², yaitu :

- a. Menetapkan standar program siaran ;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran ;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Mengenai standar siaran dan pedoman perilaku penyiaran, KPI telah mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan tgl 30 Agustus 2004. P3SPS tersebut diharapkan

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bagus, staff bagian pengawasan penyiaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Pada 12 Agustus 2014, pukul 10.00 WIB

² Lihat UU Nomor 32 Tahun 2002

berlaku sebagai *code of conduct* bagi seluruh pelaku penyelenggara siaran. Untuk tugas dan kewajiban KPI, diatur dalam pasal 8 ayat (3) UU Penyiaran³, yaitu :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM ;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran ;
- c. Ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait ;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil dan merata serta seimbang ;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran ; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Sesuai pasal 7 ayat (3) UU Penyiaran, KPI dibentuk ditingkat pusat dan daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan KPID diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi sesuai pasal 7 ayat (4) UU Penyiaran.

Ada beberapa alasan mengapa pengaturan dan pemberian izin penggunaan/alokasi frekuensi harus dilakukan oleh pemerintah⁴, karena :

- a. **Pertama**, frekuensi merupakan limited natural resources, sehingga pemanfaatannya harus diberdayakan untuk kepentingan bersama seluruh umat manusia, seperti diatur secara nasional maupun internasional. Secara nasional, aturan itu terdapat dalam UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Sedang ketentuan internasionalnya, tercantum dalam pasal 44 (2) Konstitusi

³ Ibid

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bagus, staff bagian pengawasan penyiaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Pada 12 Agustus 2014, pukul 10.00 WIB

International Telecommunication Union (ITU). Dan, pada intinya ketentuan itu mengatur frekuensi dan setiap orbit satelit (termasuk geostationary satellite orbit/GSO) merupakan sumber daya alam terbatas yang harus dimanfaatkan secara rasional, efisien dan ekonomis, sehingga setiap negara memiliki akses yang sama dalam penggunaan frekuensi dan orbit satelit.

- b. Kedua, keharusan setiap negara untuk menggunakan frekuensi secara rasional, efisien dan ekonomis ini, merupakan upaya pemerataan akses frekuensi dan orbit satelit dan untuk menghindari terjadinya harmful interference, baik di darat, laut, maupun udara, dalam penyelenggaraan telekomunikasi secara nasional, regional dan internasional. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 45 Konstitusi ITU.
- c. Ketiga, keberadaan dan fungsi frekuensi berdimensi bilateral, regional dan internasional dalam pemanfaatannya. Buktinya, setiap negara diharuskan terlibat dalam berbagai forum dan organisasi kerjasama bilateral, regional dan internasional (APEC-Tel, WTO/ GATS, ITU, Intelsat dan Inmarsat). Secara logis, keterlibatan dalam berbagai forum itu akan lebih efektif dan efisien bila ditangani pusat karena lebih memahami pertanggungjawaban administratif dan teknis operasional pemanfaatan frekuensi ketimbang pemprov.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pemerintah, berikut merupakan penjabaran dari pasal 33 UU No.32 Tahun 2002:

- a. Persyaratan umum permohonan ISR adalah sebagai berikut:
 - Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal SDPPI cq. Direktur Operasi Sumber Daya;
 - Salinan akta pendirian badan hukum beserta pengesahan dari Kemkumham;
 - Isian Formulir ISR;
 - Gambar konfigurasi jaringan dan data spesifikasi teknis perangkat;

- Perangkat yang akan digunakan harus memiliki sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi;

Untuk ISR keperluan tertentu terdapat persyaratan lainnya, seperti rekomendasi dari Kementerian Perhubungan (dinas maritim dan dinas penerbangan), landing right (dinas satelit) serta salinan izin penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi tertentu.

b. Tata cara untuk mendapatkan ISR adalah sebagai berikut :

- Pemohon menyampaikan berkas permohonan ISR beserta persyaratannya, baik melalui Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI (Gedung Menara Merdeka Lt. 11, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta) atau dikirimkan melalui jasa perposan.
- Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknis.
- Pemasukan data (data entry) kedalam database Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI.
- Analisa teknis potensi interferensi frekuensi radio terhadap pengguna eksisting.
- Penetapan penggunaan frekuensi radio dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP Frekuensi Radio dan diserahkan kepada pemohon.
- Pemohon melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio sesuai dengan nilai tarif yang tercantum dalam SPP BHP Frekuensi Radio.
- Verifikasi bukti pembayaran BHP Frekuensi Radio (by system melalui host-to-host).
- Penerbitan ISR
- SPP BHP Frekuensi Radio diterbitkan setelah permohonan ISR disetujui. SPP untuk izin baru berlaku 30 hari, apabila tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu tersebut maka permohonan ISR dibatalkan. Penerbitan SPP (tagihan) tahunan sudah dapat dilakukan 60 hari sebelum jatuh tempo. Apabila

pemohon atau wajib bayar belum menerima SPP, maka permohonan atau wajib bayar berkewajiban untuk meminta SPP tersebut dan melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio sebelum jatuh tempo

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis artinya disamping melihat langsung ketentuan Undang-Undang yang mengatur masalah perizinan frekuensi radio, juga melihat langsung yang terjadi dilapangan (masyarakat) atau *field reseach*. Alasan peneliti memilih pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud adalah yang di dapat dari hasil wawancara dengan para informan.

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus pembahasan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kominfo Kabupaten Madiun, lokasi ini dipilih karena di dalam instansi pemerintahan tersebut memuat segala peraturan yang menyangkut dalam hal perizinan radio. dalam hal ini penulis mengambil lokasi di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Madiun karena di Instansi tersebut merupakan dinas yang di usulkan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk penyelenggaraan hal Perizinan radio dan menurut data yang ada di Kabupaten Madiun sendiri merupakan wilayah yang banyak memiliki studio tetapi masih belum berizin ataupun tidak lengkapnya surat-surat dalam hal memperoleh izin siaran (mengudara).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data primer

Data Primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan/atau narasumbernya dengan melakukan studi lapang terhadap objek penelitian di lapangan, yaitu di Dinas Kominfo Kabupaten Madiun terkait Tentang Implementasi PasaL 33 Undang-undang No.32 tahun 2002 dalam permasalahan modulasi frekuensi radio yang tidak memiliki izin spektrum frekuensi, berikut dengan kendala yang dihadapi serta alternatif solusi untuk mengatasinya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi literatur/buku-buku yang terkait dengan penelitian, penelusuran internet, dan dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berasal dari hasil wawancara dengan pejabat atau anggota Dinas Kominfo baik terstruktur ataupun tidak struktur sebagai responden penelitian. Responden penelitian ini adalah sejumlah pejabat dan/atau staf anggota Dinas Kominfo lainnya yang berwenang dalam pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran Perizinan studio untuk memberikan informasi serta data yang terkait dengan permasalahan, yaitu :

- 1) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Madiun
- 2) Komunitas ataupun lembaga penyiaran di daerah madiun Radio, Televisi, media Komunitas lokal
- 3) Stake holder terkait

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang PasaL 33 Undang-undang No.32 tahun 2002, literatur-literatur mengenai Modulasi Frekuensi Radio, artikel mengenai Izin Spektrum Frekuensi, jurnal atau dokumen-dokumen penting yang berkaitan khususnya mengenai Implementasi PasaL 33 Undang-undang No.32 tahun 2002 Tentang penyiaran terkait dengan Modulasi Frekuensi Radio yang tidak memiliki Izin Spektrum Frekuensi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan teknik pengambilan data dengan melakukan percakapan dua arah dalam suasana kesetaraan dan akrab. Dengan melakukan wawancara mendalam dimaksudkan dalam rangka memahami

pandangan tineliti mengenai hidupnya, pengalamannya ataupun situasi sosial sebagaimana yang ia ungkapkan dalam bahasanya sendiri. Wawancara mendalam akan dilakukan kepada responden dan informan yang dipilih secara purposif berkaitan dengan Implementasi PasaL 33 Undang-undang No.32 tahun 2002 Tentang penyiaran terkait dengan Modulasi Frekuensi Radio yang tidak memiliki Izin Spektrum Frekuensi (Studi kasus di dinas Kominfo Kab.Madiun).

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah dengan mengambil data-data yang sudah ada, baik dari penelitian sebelumnya. dari berbagai referensi yang mendukung penelitian ini serta dari data kelengkapan tempat penelitian. Proses pengambilan data sekunder dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Pengumpulan data sekunder yang akan peneliti lakukan berasal dari data profil dinas Kominfo Kabupaten Madiun untuk mengetahui gambaran umum dan deskripsi kebijakan yang dilakukan.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu / unit atau seluruh gejala / kegiatan yang akan diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan, yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Madiun, dan pegawai studio radio.
2. Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Teknik penarikan sampel yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara memilih atau mengambil subyek-subyek yang berdasarkan pada tujuan tertentu, yaitu : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Madiun, dan Staf bagian penyiaran.

G. Metode Analisis Data

Penulis menganalisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Data-data yang didapat kemudian direduksi dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional dituangkan guna menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel-variabel yang dianalisis atau untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi, dalam hal ini adalah pelaksanaan, penerapan Pasal 33 Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran terkait dengan modulasi frekuensi radio yang tidak memiliki izin spektrum frekuensi.
2. Keputusan, dalam ini adalah Pasal 33 Undang-undang No. 32 tahun 2002 Tentang penyiaran terkait dengan Modulasi Frekuensi Radio yang tidak memiliki Izin Spektrum Frekuensi.
3. Tata cara, dalam hal ini adalah susunan langkah-langkah dalam proses penyelesaian pelanggaran implementasi pasal 33 undang-undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran terkait dengan modulasi frekuensi radio yang tidak memiliki izin spektrum frekuensi.
4. Pelanggaran, dalam hal ini adalah segala tindakan atau perbuatan lembaga

penyiaran swasta atau komunitas terkait dengan modulasi frekuensi radio yang tidak memiliki izin spektrum frekuensi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 33 UU Nomor 32 Tahun 2002 Di Kabupaten Madiun

UU Nomor 32 Tahun 2002 merupakan peraturan yang mengatur tentang penyiaran, dimana dalam undang-undang ini juga diatur tentang penyelenggaraan perizinan frekuensi bagi radio-radio swasta. Undang-undang ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Penerapan undang-undang ini dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Bentuk pengawasan untuk penyelenggaraan Radio Siaran Swasta sedikitnya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia⁵, Dewan Pers dan pengawasan lain yang dilakukan oleh organisasi terkait. Untuk kaitannya dengan masalah penyiaran, bentuk pengawasan yang diuraikan adalah yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Keberadaan KPI diatur dalam UU Penyiaran. KPI sebagai lembaga independen secara tegas diatur pada pasal 1 butir 13 UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang berada di pusat dan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UU Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Lebih lanjut, dasar hukum pembentukan KPI dimuat dalam pasal 7 UU Penyiaran.

Fungsi KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Untuk menjalankan fungsinya, KPI memiliki kewenangan berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran⁶, yaitu :

- a. Menetapkan standar program siaran ;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran ;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ;

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bagus, staff bagian pengawasan penyiaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Pada 12 Agustus 2014, pukul 10.00 WIB

⁶ Lihat UU Nomor 32 Tahun 2002

- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Mengenai standar siaran dan pedoman perilaku penyiaran, KPI telah mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan tgl 30 Agustus 2004. P3SPS tersebut diharapkan berlaku sebagai *code of conduct* bagi seluruh pelaku penyelenggara siaran. Untuk tugas dan kewajiban KPI, diatur dalam pasal 8 ayat (3) UU Penyiaran⁷, yaitu :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM ;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran ;
- c. Ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait ;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil dan merata serta seimbang ;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran ; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Sesuai pasal 7 ayat (3) UU Penyiaran, KPI dibentuk ditingkat pusat dan daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan KPID diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi

⁷ Ibid

sesuai pasal 7 ayat (4) UU Penyiaran. Selain KPI, pengawasan juga dilakukan oleh organisasi penyiaran radio dan televisi, meskipun setelah KPI berdiri, pengawasan yang dilakukan oleh organisasi tersebut telah melalui banyak kompromi, yang beberapa kali menimbulkan konflik antara KPI dan organisasi-organisasi tersebut. Organisasi-organisasi yang dimaksud adalah Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI).

PRSSNI didirikan pada tanggal 17 Desember 1974 saat para penyelenggara radio siaran swasta menyelenggarakan Kongres I Radio Siaran Swasta. Tujuan pendirian PRSSNI adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan peran anggota dalam mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa dengan memperjuangkan dan membela kepentingan anggota serta turut menciptakan kondisi menguntungkan bagi pengembangan industri radio.⁸ Berdasarkan anggaran dasarnya, PRSSNI menetapkan dan memberlakukan Standar Profesional Radio Siaran Swasta Nasional untuk melaksanakan peran dan fungsi dari sebuah radio siaran swasta nasional. Standar Profesional ini adalah perwujudan dari *self regulation* industri radio siaran yang disusun, dikembangkan serta disosialisasikan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik PRSSNI sebagai pedoman bagi penyelenggaraan radio siaran. Pedoman tersebut mengalami evaluasi di setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat, negara dan kemajuan teknologi industri radio siaran swasta. Meskipun demikian, pedoman tersebut tetap menjamin kebebasan berkreasi, berekspresi, dan menjalankan bisnis serta beroperasi sesuai dengan kebijakan dalam hal kebebasan individu yang sejalan dengan tanggung jawab sosial. Prinsip bagi penyelenggaraan radio siaran swasta adalah kebebasan

⁸ Anggaran Dasar PRSSNI, Jakarta, 2001

yang disertai tanggung jawab dalam rangka mengutamakan kepentingan, kenyamanan dan kebutuhan masyarakat. Disamping itu pedoman tersebut mengarah pada standar profesionalisme radio siaran yang tinggi. Dalam hal pengawasan, sesuai anggaran dasar PRSSNI, pengawasan terhadap pelaksanaan standar profesional radio siaran dilakukan oleh Dewan Pengawas Standar Profesional radio Siaran.

Dalam proses pengawasan ini, pemberian Izin Frekuensi oleh Daerah Semenjak dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti dari UU No. 22 tahun 1999, Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan yang begitu luas. Hal ini jelas terlihat dalam pasal yang mengaturnya. Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004, yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan menyebutkan : 1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah⁹. 2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan kewenangannya tersebut tentu harus diantisipasi secara tegas bahwa daerah “tidak boleh mengeluarkan izin frekuensi. Karena hal ini telah terjadi beberapa waktu lalu dimana daerah provinsi mengeluarkan izin frekuensi¹⁰ menimbulkan berbagai kontroversi. Tentu saja hal ini disatu sisi, pemerintah

⁹ Pemerintah adalah pemerintah pusat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 32 tahun 2004 . Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi : a. politik luar negeri, b. pertahanan, c. keamanan, d. yustisi, e. moneter dan fiskal nasional, f. agama.

¹⁰ Adanya penataan frekuensi siaran radio FM (Frequency Modulation) yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 15/2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Radio Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM, dan Kep Dirjen Postel No. 15 A/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Radio Siaran FM, telah menimbulkan berbagai permasalahan khususnya dengan adanya penafsiran bahwa pemerintah daerah dapat memberikan izin frekuensi.

provinsi merasa paling berhak mengeluarkan izin tersebut. Di sisi lain, izin penggunaan/alokasi frekuensi dan penyelenggaraan siaran radio dan TV lokal diklaim sebagai kewenangan pemerintah pusat (selanjutnya disebut pemerintah). Alasannya adalah, kewenangan pengaturan dan pemberian izin penggunaan frekuensi dan penyelenggaraan siaran, baik untuk radio maupun TV lokal, merupakan kewenangan pemerintah dan bukan kewenangan pemprov. Ada beberapa alasan mengapa pengaturan dan pemberian izin penggunaan/alokasi frekuensi harus dilakukan oleh pemerintah¹¹, karena :

- a. **Pertama**, frekuensi merupakan limited natural resources, sehingga pemanfaatannya harus diberdayakan untuk kepentingan bersama seluruh umat manusia, seperti diatur secara nasional maupun internasional. Secara nasional, aturan itu terdapat dalam UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Sedang ketentuan internasionalnya, tercantum dalam pasal 44 (2) Konstitusi International Telecommunication Union (ITU). Dan, pada intinya ketentuan itu mengatur frekuensi dan setiap orbit satelit (termasuk geostationary satellite orbit/GSO) merupakan sumber daya alam terbatas yang harus dimanfaatkan secara rasional, efisien dan ekonomis, sehingga setiap negara memiliki akses yang sama dalam penggunaan frekuensi dan orbit satelit.
- d. **Kedua**, keharusan setiap negara untuk menggunakan frekuensi secara rasional, efisien dan ekonomis ini, merupakan upaya pemerataan akses frekuensi dan orbit satelit dan untuk menghindari terjadinya harmful interference, baik di darat, laut, maupun udara, dalam penyelenggaraan telekomunikasi secara nasional, regional dan internasional. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 45 Konstitusi ITU.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bagus, staff bagian pengawasan penyiaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Pada 12 Agustus 2014, pukul 10.00 WIB

- e. **Ketiga**, keberadaan dan fungsi frekuensi berdimensi bilateral, regional dan internasional dalam pemanfaatannya. Buktinya, setiap negara diharuskan terlibat dalam berbagai forum dan organisasi kerjasama bilateral, regional dan internasional (APEC-Tel, WTO/ GATS, ITU, Intelsat dan Inmarsat). Secara logis, keterlibatan dalam berbagai forum itu akan lebih efektif dan efisien bila ditangani pusat karena lebih memahami pertanggungjawaban administratif dan teknis operasional pemanfaatan frekuensi ketimbang pemprov.

Selain itu, koordinasi pemanfaatan frekuensi, baik internal (pemerintah dan penggunaan frekuensi), maupun secara eksternal (pemerintah dan negara lain dan berbagai badan/ organisasi telekomunikasi regional dan internasional), akan lebih mudah dilaksanakan bila ditangani pemerintah. Tindakan beberapa pemprov yang getol mengeluarkan izin penggunaan/alokasi frekuensi dan penyelenggaraan siaran radio dan TV lokal dalam satu paket, merupakan tindakan yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif.

- a. Pertama, secara alamiah karakteristik frekuensi tidak mengenal batas-batas wilayah daerah (borderless region), sehingga sangat sulit untuk menentukan secara pasti batas area frekuensi suatu daerah. Konsekuensinya, pemberian izin penggunaan/alokasi frekuensi dan penyelenggaraan siaran radio dan TV lokal oleh pemprov, sangat berpotensi menimbulkan sengketa mengenai batas area frekuensi antar pemprov. Sengketa batas wilayah penangkapan ikan antar daerah/provinsi di Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu, misalnya, menunjukkan betapa sengketa batas wilayah yang tampak kasat mata dapat terjadi, apatah lagi bila batas wilayah yang disengketakan secara fisik tidak kelihatan.

- b. Kedua, kewenangan pemerintah mengeluarkan izin penggunaan/alokasi frekuensi dan penyelenggaraan siaran radio dan TV, termasuk radio dan TV lokal, bertujuan untuk mengatasi berbagai kekacauan dalam penggunaan/ alokasi frekuensi. Fakta menunjukkan bahwa kekacauan tersebut telah menimbulkan banyak gangguan interferensi-bukan hanya antara penyelenggara siaran radio, tetapi juga dengan pengguna frekuensi lainnya-khususnya di daerah yang telah menerbitkan izin penggunaan/alokasi frekuensi dan penyelenggaraan siaran radio dan TV lokal yang berbasis peraturan daerah.
- c. Ketiga, secara ekonomis perda yang dibuat pemprov tersebut berpotensi besar menimbulkan pungutan liar dan ekonomi biaya tinggi, yang timbul sebagai akibat kecenderungan pemprov, termasuk pemda kabupaten/kota, menambah pendapatan atas nama peningkatan PAD, terhadap penyelenggara siaran radio dan TV lokal, utamanya yang berskala nasional. Karena konsekuensi logis keberadaan perda itu, akan mewajibkan setiap penyelenggara siaran radio dan TV berskala nasional, meminta izin kepada setiap pemda dimana mereka nantinya beroperasi.

Penataan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah sesungguhnya dimaksudkan untuk menanggulangi terjadinya tumpang tindih pita frekuensi. Dalam penyelenggaraan sistem telekomunikasi ber bergerak seluler generasi ketiga (IMT-2000), ada dua alokasi frekuensi yang tumpang tindih, yaitu UMTS dan PCS-1900. Penataan akan dilakukan berpedoman pada rekomendasi ITU-R M. 1036-2. Rekomendasi ITU-R M.1036-2 berisikan tatanan frekuensi untuk implementasi komponen terrestrial IMT-2000. Dengan tatanan frekuensi yang direkomendasikan tersebut, maka dimungkinkan penggunaan spektrum yang efisien dan efektif untuk penyelenggaraan IMT-2000. Sehingga, pemborosan sumberdaya alam yang terbatas

dan vital ini dapat diatasi. Penataan frekuensi memang harus dilaksanakan. Dan, ada 2 (dua) alasan yang mendasarinya :

1. *Pertama*, selama ini kita memang tidak mempunyai satu desain alokasi spektrum frekuensi yang jauh ke depan. Sehingga, tumpang tindih ataupun geser-menggeser bukan hal yang aneh dalam pita frekuensi di Indonesia. Ini bisa dilihat dengan apa yang pernah terjadi pada alokasi frekuensi 2,4 GHz maupun alokasi frekuensi untuk radiodan televisi. Soal geser-menggeser frekuensi ini secara teori mudah dilakukan, namun dalam praktiknya diperlukan effort dan dana tambahan yang tidak sedikit.
2. *Kedua*, kebijakan yang diambil tidak berlangsung dalam “ruang hampa”, sehingga mau tidak mau serta suka tidak suka akan terjadi pertarungan kepentingan yang tajam antar pihak yang terlibat dalam rencana penataan frekuensi untuk 3G tersebut. Yaitu, operator yang digeser frekuensinya karena akan dialokasikan untuk 3G, operator yang telah mendapatkan ataupun berkeinginan untuk mendapatkan lisensi 3G, serta pemerintah yang ingin mendapatkan up front fee sebesar mungkin dengan melakukan tender ulang lisensi dan mengoptimalkan alokasi frekuensi.

Dalam hal penataan kembali frekuensi dan mungkin dilanjutkan dengan tender ulang yang akan dilakukan berkaitan dengan lisensi, maka yang perlu dikedepankan adalah konsultasi secara intensif yang melibatkan seluruh stakeholder telekomunikasi, baik yang terlibat secara langsung dengan penataan tersebut, maupun para pakar, akademisi dan praktisi, agar didapat masukan yang menjadikan kebijakan untuk penataan ulang spektrum frekuensi 3G tersebut dapat diimplementasikan dengan hasil optimal.

Peran kelembagaan dalam mengatur penggunaan frekuensi radio dan lembaga yang memiliki kompetensi terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Masih belum adanya pemahaman mengenai “apa frekuensi radio”, seringkali menganggap bahwa frekuensi radio merupakan benda yang dapat dimiliki oleh lembaga/unit tertentu, terlebih dengan adanya otonomi daerah. Seringkali daerah mengasumsikan bahwa frekuensi radio dapat dikelola berdasarkan kewenangan daerah. Dengan adanya asumsi yang demikian, maka proses pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi seringkali mengalami hambatan. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian dalam penegakan hukumnya, maka perlu peraturan-peraturan tertentu yang memberikan penguatan terhadap lembaga-lembaga terkait di bidang telekomunikasi. Dalam kaitannya dengan peraturan, sesungguhnya aturan yang ada telah lengkap, namun masih diperlukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan, tentu yang tak kalah penting penyempurnaan peraturan harus diikuti dengan konsistensi pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Didasarkan atas hal-hal di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa terjadinya praktek penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya dikarenakan: masih diterapkannya kebijakan yang memihak kepentingan kelompok; inkonsistensi dalam pelaksanaan undang-undang; penerapan sistem tender yang tidak transparan; kurangnya aturan pelaksanaan yang dapat mengurangi praktek penyalahgunaan frekuensi radio; tidak berperannya regulator, dalam hal ini BRTI karena terbatasnya wewenang baik dari aspek dasar hukum pembentukannya, struktur organisasinya maupun kemandiriannya secara financial; serta lemahnya law enforcement terhadap praktek penyalahgunaan penggunaan

frekuensi radio karena wewenang terbatas yang dimiliki lembaga pengawas. Terdapatnya bentuk penyalahgunaan penggunaan frekuensi radio dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Sangat kuatnya posisi “incumbent operator” dalam mempengaruhi proses perumusan kebijakan dan pemformulasian aturan pelaksanaan;
- b. Pemahaman yang belum komprehensif pada berbagai kalangan mengenai manfaat dari manajemen penggunaan frekuensi radio yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, membuat harga/tarif lebih terjangkau oleh kalangan yang lebih luas serta meningkatnya teledensitas telekomunikasi yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi percepatan pembangunan;
- c. Masih adanya pandangan yang ingin memberikan proteksi kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap “mewakili” kepentingan negara dan “nasionalisme” terhadap kemungkinan dominasi operator asing pada bidang telekomunikasi;

Kebijakan pemerintah atasi kesimpangsiuran perijinan dalam rangka meningkatkan dan memperluas kegiatan penerangan ke seluruh pelosok Indonesia. salah satunya adalah fungsi informasi, yaitu media massa (Radio Siaran) melalui program acara yang dimilikinya menyampaikan informasi-informasi penting berkaitan dengan pembangunan baik melalui pemberitaan, seperti *straight news*, *feature*, *soft news*, maupun melalui dialog interaktif yang melibatkan masyarakat sebagai khalayak dan narasumber yang terkait. Ada tiga aspek informasi dan pembangunan yang berkaitan dengan tingkat analisisnya yang dikemukakan oleh Hedebero (1979) dalam Zulkarnaen N. (2002: 95), yaitu:

1. Pendekatan yang berfokus pada pengembangan suatu bangsa, dan bagaimana media massa dalam pengertian yang umum merupakan objek studi, sekaligus

masalah-masalah yang menyangkut struktur organisasional dan pemilikan,serta kontrol terhadap media.

2. Media dilihat sebagai pendidik, yaitu bagaimana media massa dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan kepada masyarakat bermacam ketrampilan dan dalam kondisi tertentu mempengaruhi sikap mental dan perilaku mereka.
3. Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau daerah/desa. Konsentrasinya adalah pada mengenalkan ide-ide baru, produk dan cara-cara baru, dan penyebarannya di suatu desa atau wilayah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2002 dilakukan dengan memberikan pengawasan terhadap siaran radio swasta, pengawasan ini mencakup tentang konten siaran serta izin siaran. Dalam melakukan pengawasan terhadap izin penyiaran ini pemerintah melakukan beberapa pemetaan terhadap radio yang sudah berizin dan yang belum memiliki izin. Pemetaan ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih saat siaran serta tidak ada masalah pada jalur frekuensi sehingga radio yang sudah mengantongi izin tidak merasa adanya pilih kasih.
2. Banyaknya radio yang tidak memiliki izin frekuensi dikarenakan karena alasan birokratis dan administrative dari pihak penyelenggara izin. Bagi para pemilik radio swasta ilegal atau tidak berizin ini banyaknya peraturan yang harus diterapkan untuk mendapatkan izin serta iuran penyiaran yang tidak sedikit jumlahnya juga menjadi hambatan.
3. Hambatan yang dialami dalam penyelenggaraan izin ini terdapat pada prosedur yang harus dilalui oleh sebuah radio untuk mendapatkan izin. Prosedur-prosedur yang diberikan selain memakan biaya juga memakan waktu.

B. Saran

1. Pemahaman yang komprehensif pada berbagai kalangan mengenai manfaat dari manajemen penggunaan frekuensi radio menjadi sangat penting. Karena itu perlu sosialisasi atas pengaturan pengelolaan frekuensi radio ke berbagai pihak.
2. Adanya beberapa kebijakan yang menyimpang sehingga menguntungkan pihak tertentu, perlu dilakukan warning ataupun tindakan-tindakan hukum kepada pihak-pihak tertentu terutama pihak-pihak yang sudah sangat menikmati pengelolaan bisnis yang menggunakan frekuensi di bidang telekomunikasi untuk

lebih bersifat fair dalam menjalankan bisnisnya; Masih adanya pandangan yang ingin memberikan proteksi kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap “mewakili” kepentingan negara dan “nasionalisme” terhadap kemungkinan dominasi operator asing pada bidang telekomunikasi, perlu dikaji ulang.

3. Efektifitas lembaga dalam mengawasi penggunaan frekuensi radio perlu ditingkatkan, karena itu kemandirian lembaga-lembaga pengawas menjadi prioritas dalam pembangunan sektor telekomunikasi.
4. Perlu aturan yang dapat menentukan secara tegas siapa yang dapat melakukan pelaksanaan law enforcement atas pelanggaran penyalahgunaan penggunaan frekuensi radio (terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar PRSSNI, Jakarta, 2001
- Buletin Pos Dan Telekomunikasi, Volume 10 Nomor 1 Maret 2012
- Bungin, Burhan. 2006. Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus. Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta :Kencana.
- Demi Frekuensi Milik Publik”, Bidang isi Siaran KPI Pusat 2012
- Djati Kusumo Widjojo, Radio Agen Pembangunan Daerah, Majalah Ekspoenen, periode bulan Juni 1996
- Denny Setiawan. 2010. Alokasi Frekuensi Kebijakan Dan Perencanaan Spektrum
- Effendy, Onong Uchjana. (2006). Teori dan Praktik Ilmu Komunikasi. Bandung: Resdakaya
- Harsono, Hanifah. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya Indonesia. Jakarta Depkominfo.
- Hovland, Carl I., Komunikasi Politik (Konsep, Teori, dan Strategi), Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2009.
- Islamy, Irfan M. (1997). *Kebijakan Suatu Proses Politik*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo
- Laswell, Harold D. *The Structure And Function Of Communication In Society*. New York: Harper, 1948. Dikutip dalam Onong Uchjana Efendi. 2006. Teori dan Praktik Ilmu Komunikasi, 9-11, Bandung: Resdakaya,
- Nurudin. 2007. Komunikasi Massa. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset
- Shimp, Terence A. 2000. *Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu Jilid 1*. (Revyani Syahrial, Penerjemah) Jakarta: Penerbit Erlangga,
- Sudiyono. (2007). Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan. Buku Ajar. Sutisna. 2001 *Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Tangkilisan. (2003) *Kebijakan*. Jakarta:Media Pesada
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- West, Richard dan Lynn H. 2007. Turner. *Introducing Communication Theory*. New York : McGraw Hill